

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara kepulauan yang berada di kawasan Asia Tenggara yang dilalui garis katulistiwa adalah negara Indonesia. Negara Indonesia terletak diantara 2 benua yaitu, benua Asia dan benua Australia, serta terletak antara 2 samudera yaitu samudera hindia dan samudera pasifik. Negara Indonesia juga terletak pada pertemuan antara tiga lempeng tektonik besar dunia, yaitu Lempeng Australia, Lempeng Eurasia, dan Lempeng Pasifik. Letak geografis tersebut, menjadikan Indonesia menjadi negara yang memiliki risiko tinggi terhadap bencana alam. Indonesia seringkali mengalami berbagai jenis bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung dan lain sebagainya.

Indonesia terletak pada koordinat 6°LU- 11° LS dan 95° BT - 141°45 BT yang menjadikan indonesia beriklim tropis sehingga memiliki dua musim yaitu musim hujan dan kemarau. Pada bulan Oktober hingga Maret Indonesia mengalami musim hujan sehingga menyebabkan beberapa daerah di Indonesia rawan mengalami bencana alam yaitu banjir dan tanah longsor. Hal tersebut disebabkan karena volume curah hujan yang lebat, terbatasnya wilayah penyerapan air, penebangan hutan secara liar, serta pengelolaan lingkungan dan drainase yang buruk. Memasuki bulan April hingga September, Indonesia mengalami musim

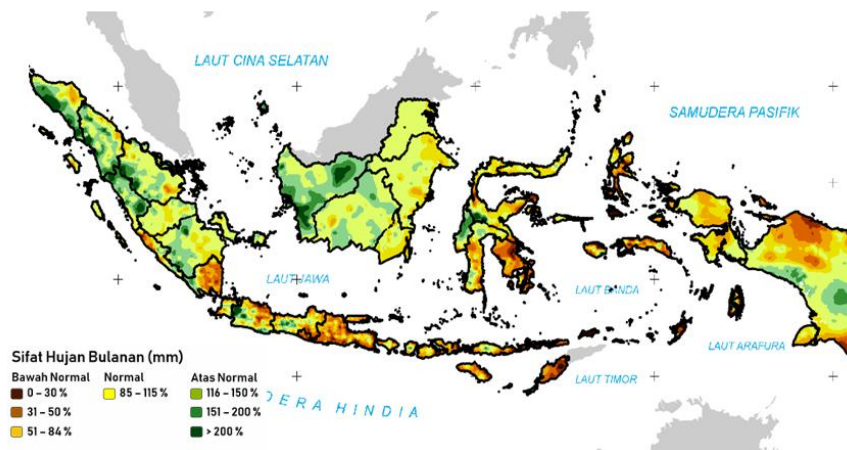
kemarau dan bencana yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba yaitu kekeringan, kebakaran hutan, dan kekurangan air bersih.

Dilansir dari Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) pada tahun 2023, telah terjadi 5400 kejadian bencana alam di Indonesia. Rincian kejadian bencana tersebut terdiri dari kebakaran hutan dan lahan sebanyak 2.051 kejadian, bencana banjir dengan 1.255 kejadian, kekeringan dengan 174 kejadian, tanah longsor sebanyak 591 kejadian, gempa bumi dengan 31 kejadian, dan cuaca ekstrim sebanyak 1261 kejadian serta letusan gunung berapi dengan 4 kejadian.

BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) mencatat bahwa bencana alam yang terjadi pada tahun 2023 sebagian besar didominasi oleh kejadian *hidrometeorologi* yaitu sebanyak 5365 kejadian sedangkan sisanya merupakan bencana geologi. Bencana hidrometeorologi terjadi akibat faktor cuaca seperti parameter curah hujan, suhu, kelembaban, dan angin (Saragih et al., 2021). Tingginya kejadian bencana *hidrometeorologi* dipengaruhi karena letak geografis dan kondisi topografi Negara Indonesia. Menurut Hermon (dalam Sidauruk et al., 2023) bencana *hidrometeorologi* dapat terjadi akibat rusaknya sistem hidrologi yang dapat mengganggu kondisi iklim dan air di permukaan bumi. Rusaknya sistem hidrologi tersebut memicu adanya perubahan cuaca yang ekstrem seperti adanya fenomena LaNina, ElNino, Munsoon, siklon topis dan gangguan cuaca lainnya.

Gambar 1.1

Peta Pantauan Curah Hujan



Sumber: BMKG

Berdasarkan data yang diambil dari website BMKG pada bulan November 2023, sejumlah 63,49% wilayah Indonesia mengalami curah hujan dalam kategori menengah. Sejumlah 24,01% wilayah lainnya mengalami curah hujan dengan intensitas tinggi hingga sangat tinggi dan sejumlah 12,5% mengalami curah hujan kategori rendah.

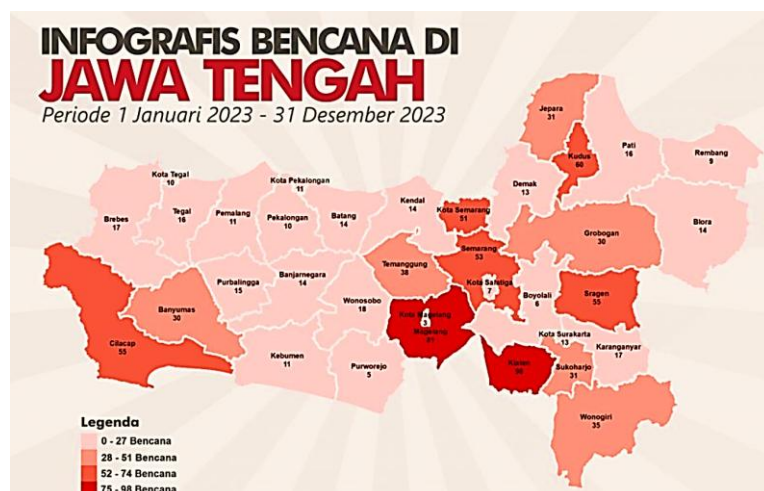
Data jumlah bencana alam periode 1 Januari hingga 31 Desember 2023 yang dilansir dari laman website <https://bpbd.jatengprov.go.id> mencatat telah terjadi 947 kejadian bencana alam di Jawa Tengah. Berdasarkan total keseluruhan kejadian bencana tersebut, kebakaran hutan menjadi bencana alam yang sering terjadi yaitu 490 kejadian, diikuti dengan kejadian banjir sebanyak 132 kali, tanah longsor sebanyak 126, angin kencang atau puting beliung sebanyak 115 kejadian,

kekeringan dengan 34 kejadian, banjir rob 29 kejadian dan gempa bumi dengan 12 kejadian.

Data BPBD menunjukkan bahwa bencana banjir menjadi urutan ke-2 (dua) terbanyak karena curah hujan di Indonesia yang tinggi akibat adanya fenomena iklim dengan skala besar salah satunya La Nina. Fenomena La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di wilayah Timur Ekuator Samudra Pasifik berada di bawah kondisi normal, sementara suhu permukaan laut di perairan Indonesia lebih hangat (Suhadi et al., 2023). Kondisi ini mengakibatkan massa udara berkumpul menjadi satu di wilayah Indonesia yang nantinya dapat memicu awan serta hujan. Avia L (dalam Suhadi et al., 2023) menyebutkan bahwa fenomena La Nina mampu menyebabkan perubahan curah hujan yang jauh di atas rata-rata sehingga dapat menciptakan ancaman bencana banjir dan tanah longsor, bahkan diikuti angin kencang.

Gambar 1.2

Infografis Bencana di Jawa Tengah



Sumber : BPBD Provinsi Jawa Tengah

Data yang dilansir dari BPBD Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa Kabupaten Kudus merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang rentan terhadap ancaman terjadinya bencana alam. Pada periode Januari hingga Desember 2023 terlihat Kabupaten Kudus telah mengalami 60 kejadian bencana alam. Jika dilihat secara topografi, wilayah Kabupaten Kudus terdiri dari daerah pengunungan dan dataran rendah. Kondisi ini membuat wilayah Kabupaten Kudus rentan terjadi bencana alam diantaranya yaitu bencana banjir, tanah longsor, puting beliung, kekeringan, kebakaran lahan, dan lain-lain.

Dikutip dari kompas.com, penurunan muka tanah atau *land subsidence* pada daerah Jawa Tengah khususnya kawasan Pantura mencapai 20 sentimeter setiap tahunnya. Kondisi ini dinilai lebih parah dari penurunan tanah di DKI Jakarta yang hanya mencapai 10 sentimeter setiap tahunnya. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan sehingga belakangan ini wilayah Pantura seperti Semarang, Demak, Kudus dan Pati kerap dilanda bencana banjir. Berikut akan disajikan data jenis bencana alam dan jumlah terjadinya di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2023.

Tabel 1.1

Data Bencana Alam di Kabupaten Kudus Pada Tahun 2019-2023

Tahun	Jenis Bencana					Total
	Kejadian Kebakaran	Banjir	Tanah Longsor	Puting Beliung	Kekeringan	
2019	167	28	9	9	—	274
2020	38	35	29	5	2	205
2021	46	40	21	72	0	257
2022	65	17	41	87	0	348

Tahun	Jenis Bencana					Total
	Kejadian Kebakaran	Banjir	Tanah Longsor	Puting Beliung	Kekeringan	
2023	195	122	36	30	19	402
Total	511	242	136	203	21	1486

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus

Berdasarkan tabel 1.1 tentang data bencana yang terjadi di Kabupaten Kudus tahun 2019-2023 dapat diketahui bahwa banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi sehingga menempati peringkat kedua dengan 242 kejadian di sepanjang tahun 2019-2023. Data tersebut juga memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan kejadian banjir secara signifikan yakni pada tahun 2023 yang mencapai 122 kejadian.

Tabel 1.2

Data Kejadian Bencana Banjir di Kabupaten Kudus Tahun 2020-2023

No.	Kecamatan	Jumlah Kejadian Bencana Banjir			
		2020	2021	2022	2023
1.	Kaliwungu	10	11	4	20
2.	Kota	0	0	0	0
3.	Jati	12	6	3	21
4.	Undaan	1	6	3	33
5.	Mejobo	6	13	5	29
6.	Jekulo	6	3	2	17
7.	Bae	0	0	0	2
8.	Gebog	0	1	0	0
9.	Dawe	0	0	0	0

Sumber : BPBD Kabupaten Kudus

Data diatas menunjukkan bahwa banjir kerap terjadi di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Undaan, Kecamatan Mejobo, Kecamatan Jati dan Kecamatan

Kaliwungu. Banjir tersebut terjadi akibat intensitas curah hujan yang tinggi dan luapan sungai sehingga daerah yang memiliki letak geografis yang lebih rendah akan menjadi daerah langganan banjir.

Pada awal tahun 2024, banjir kembali menggenang beberapa wilayah di Kabupaten Kudus selama beberapa hari. Di kutip dari berita yang diterbitkan oleh TIRTO.ID, banjir terjadi sejak 14 Maret 2024 dan merendam 29 desa di lima kecamatan. Banjir tersebut diakibatkan karena curah hujan yang turun secara terus menerus sehingga menyebabkan debit air di sejumlah sungai meningkat. Air kemudian meluap ke beberapa desa karena sungai sudah tidak lagi mampu menahan debit air. Berdasarkan data yang dirilis di laman instagram resmi @bpbdkuduskab menunjukkan bahwa banjir yang terjadi pada bulan Maret 2024 telah merendam 6.505 rumah warga, dan 13.983 Kepala Keluarga (KK) terdampak. Banjir juga merendam 2.148,24 Ha lahan sawah milik warga. Banjir setinggi 5-10 cm tersebut mengakibatkan beberapa akses jalan tidak bisa dilewati sehingga menghambat mobilitas masyarakat setempat. Banjir yang terjadi di Kabupaten Kudus tidak hanya terjadi sekali atau dua kali saja, namun banjir menjadi agenda tahunan pada saat musim penghujan tiba.

Tabel 1.3

Data Kerugian Akibat Banjir di Kabupaten Kudus Tahun 2021-2023

Tahun	Kerugian	Luas/Jumlah
2021	Materil	Rp230.000.000
	Korban terdampak	35.144 jiwa
	Rumah terendam	13.236 rumah

Tahun	Kerugian	Luas/Jumlah
	Mobil rusak berat	1 unit
2022	Materil	Rp20.000.0000
	Korban terdampak	20.137 jiwa
	Rumah terendam	1.768 rumah
	Sawah/Lahan terendam	1.310Ha
	Korban mengungsi	163 jiwa
2023	Materil	Rp179.237.848.000
	Korban terdampak	84.368 jiwa
	Rumah terendam	3.376 rumah
	Sawah/lahan terendam	11.062Ha
	Korban mengungsi	1.752 jiwa
	Rumah rusak	2 rumah

Sumber : BPBD Kabupaten Kudus

Data diatas menunjukkan bahwa banjir yang terjadi setiap tahunnya menimbulkan dampak kerugian yang begitu besar bagi masyarakat. Banjir yang terjadi merendam sebagian rumah warga sehingga mereka harus terpaksa mengungsi di daerah lain. Upaya pemerintah khususnya dinas PUPR dalam penanggulangan banjir dirasa belum optimal dikarenakan masih terjadi pada setiap tahunnya dan di Kabupaten Kudus semakin banyak yang terendam. Bencana banjir di wilayah perkotaan juga diakibatkan karena kurang optimalnya penataan tata ruang. Penataan ruang yang tidak dirancang secara menyeluruh dapat memperburuk dampak curah hujan tinggi karena ruang terbuka hijau dan area resapan air menjadi terbatas. Oleh karena itu, perencanaan ruang yang tepat sangat diperlukan untuk menekan risiko banjir di wilayah perkotaan. Hal tersebut juga diperkuat dengan

adanya aduan dan keluhan dari masyarakat terkait kinerja dinas PUPR yang disampaikan melalui berbagai *platform*.

Gambar 1.3

Tangkapan Layar Aduan Masyarakat

ID. 3112201951

Bagikan [Share](#) [Email](#) [Print](#)

:

OLEH AHMAD DZUL AUFA

03 Januari 2023, 10:13:03 WIB

Setiap hujan lebat, pasti ada genangan air di jalan yg tak dapat masuk ke selokan /saluran air. Desember yg lalu Dinas PU membuat saluran, tapi terlihat percuma ,tidak bermanfaat karena tidak ada pengaruhnya terhadap genangannya. Mohon ditindaklanjuti, terima kasih

DRAINASE BURUK

ID. 3112201806

Bagikan [Share](#) [Email](#) [Print](#)

:

OLEH IRSA

14 Juni 2021, 16:52:47 WIB

Sekarang di sepanjang Jln menuju UMK, tepatnya dersalam jalan sisi barat. Bnyak dibangun ruko2, yg mana banyak menutup saluran air tanpa diberi lubang kontrol. Shg saat hujan sebentar air tdk dpt mengalir, dan mampet. Yg menyebabkan got menjadi sarang nyamuk, dan saat hujan deras cenderung air masuk halaman bahkan rumah. Mohon dilakukan normalisasi dan plesterannya diberi bak kontrol. Sbg contoh gambar ini, airnya g mengalir, justru mengandung minyak, kbetulan rmh saya tidak menutup gotnya.

Rincian Aduan : **LGWP68922843**

Selesai

Public



KABUPATEN KUDUS, 17 Jan 2024

Yth bapak/ibu gorong-gorong di pertigaan desa megawon RT 04 RW 01, kec.jati, kab. kudus mampet.. Minta tolong dibantu di bersihkan.. Karena pas hujan air meluber sampai kejalan dan ke rumah warga.. Terima kasih

#PEMBANGUNAN / PERBAIKAN SALURAN AIR

Rincian Aduan : **LGIG93034257**

Selesai

Public

KABUPATEN KUDUS, 25 Oct 2023

Lokasi aduan:

Kabupaten/Kota : Kudus ,Kecamatan : jati ,Desa/kelurahan : Tanjung karang

merujuk video Dari akun ISK, dan memang dilokasi tsb sering trjadi genangan air yang memicu tersendatnya arus lalu lintas kudus-purwodadi. Hujan semalam hanya sekitar 30menit tapi genangan air masih ada sampai pagi, tahun lalu pun begitu banjir di lokasi tsb benar benar sperti ga mengalir sama sekali hampir 2minggu. Mohon segera ditindaklanjuti pihak terkait untuk mengoptimalisasi gorong² dan saluran air sekitar area tsb. Terima kasih

#PEMBANGUNAN / PERBAIKAN SALURAN AIR

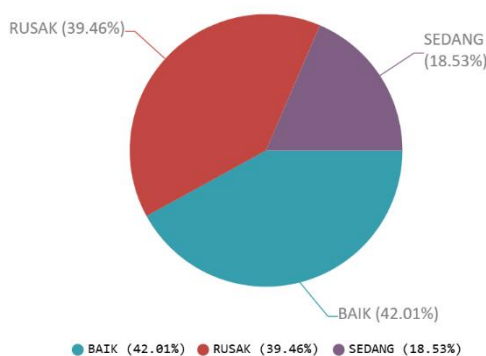
Sumber : Kanal Aduan SIMPONI dan LaporGub

Aduan masyarakat terkait permasalahan drainase disampaikan pada Kanal Aduan SIMPONI (Sistem Manajemen Pengaduan Online Interaktif) dan LaporGub. Masyarakat memberikan kritik dan mendesak perlu adanya tindakan perbaikan drainase agar air dapat mengalir dan tidak menggenangi jalan. Saluran drainase adalah salah satu bagian penting dari infrastruktur publik khususnya di wilayah perkotaan yang berperan penting dalam mendukung kenyamanan, keamanan, dan

kesehatan masyarakat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Saluran drainase berperan sebagai sarana untuk mengalirkan air guna mencegah terjadinya genangan, banjir, maupun erosi pada daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Drainase yang terletak di wilayah perkotaan biasanya dibangun di sepanjang sisi jalan dengan tujuan untuk mengalirkan air menuju lokasi yang lebih rendah. Namun dalam situasi tertentu, saluran drainase ini dapat mengalami penyumbatan sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Penyumbatan dan kondisi drainase yang buruk juga masih menjadi permasalahan di Kabupaten Kudus.

Gambar 1.4

Statistik Kondisi Jaringan Drainase Berdasarkan Kabupaten Tahun 2023



Sumber : Website Resmi Dinas PUPR Kab. Kudus

Berdasarkan data statistik yang di lansir dari website milik Dinas PUPR memperlihatkan bahwa kondisi drainase rusak cukup tinggi yaitu mencapai 39,46%. Berikut ini akan disajikan tabel mengenai kondisi infrastruktur pekerjaan umum yang diperoleh dari dokumen LKjIp Dinas PUPR Kabupaten Kudus.

Tabel 1.4

Kondisi Infrastruktur Pekerjaan Umum Tahun 2020-2023

No.	URAIAN	TAHUN 2020 (%)	TAHUN 2021 (%)	TAHUN 2022 (%)	TAHUN 2023 (%)
1.	Jalan	91,94	92,34	93,34	94,69
2.	Jembatan	90,17	90,17	91,06	91,29
3.	Drainase	63,03	64,00	65,00	65,45
4.	Irigasi	87,64	87,90	90,02	90,28
	Nilai Rata-Rata	83,19	83,60	84,86	85,43

Sumber : LKjIP Dinas PUPR Kab. Kudus Tahun 2023

Dinas PUPR berperan penting dalam menyediakan infrastruktur daerah. Beberapa program pembangunan yang telah dilaksanakan terbagi menjadi 3 sektor yaitu sektor prasarana jalan dan jembatan, sektor pengairan dan sektor penataan ruang. Pada LKjIP Dinas PUPR Tahun 2023 terlihat bahwa kondisi infrastruktur drainase dalam kondisi baik mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun drainase masih menjadi infastruktur yang memiliki presentasi rendah dibandingkan dengan tiga infrastruktur lainnya. Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya perhatian yang lebih pada pemeliharaan dan pengelolaan saluran drainase.

Pada perencanaan pembangunan, sistem drainase merupakan salah satu elemen penting sebagai infrastuktur dasar yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sistem drainase memiliki berbagai fungsi, antara lain menyalurkan air hujan, memperindah lingkungan kota, serta mendukung sistem pengairan. Keberadaan drainase dinilai sangat krusial bagi sebuah kota terutama sebagai sarana

mengalirkan air hujan. Namun, meningkatnya jumlah bangunan dapat mengurangi luas area resapan karena permukaan tanah tertutup oleh struktur bangunan. Kondisi ini mengakibatkan saat hujan turun dalam waktu yang lama, air sulit meresap dan menyebabkan genangan. Kondisi ini dapat menjadi bencana khususnya bagi para pedagang yang beraktivitas di daerah rawan banjir. Ketidakmampuan drainase menyalurkan air dengan baik saat curah hujan tinggi menjadi salah satu pemicu utama terjadinya banjir.

Gambar 1.5

Capaian Analisis Realisasi Kinerja Dinas PUPR Tahun 2023

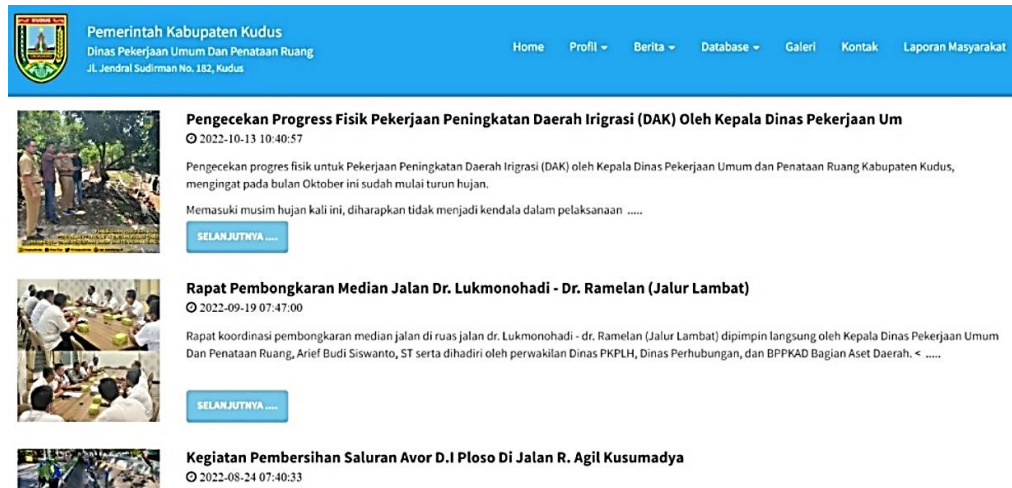
No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Persentase (%) Infrastruktur Pekerjaan Umum dalam kondisi Mantap	83,73	85,43	102,03	Berhasil	dipertahankan
2	Terwujudnya pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	100	98,60	98,60	Kurang	Perlu ditingkatkan
3	Terwujudnya administrasi pertanahan sesuai ketentuan	Persentase Penyelesaian administrasi pertanahan	74,84	75,00	100,21	Berhasil	dipertahankan
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	91,00 Nilai	69,15 Nilai	75,99	Kurang	Perlu ditingkatkan

Sumber : LKjIP Dinas PUPR Kabupaten Kudus

Berdasarkan analisis capaian realisasi kinerja dengan target tahun 2023, diketahui bahwa nilai evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Dinas PUPR masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat terlihat pada target capaian analisis akuntabilitas kinerja perangkat daerah tahun 2023 yaitu 91% namun realisasinya hanya 69,15%.

Gambar 1.6

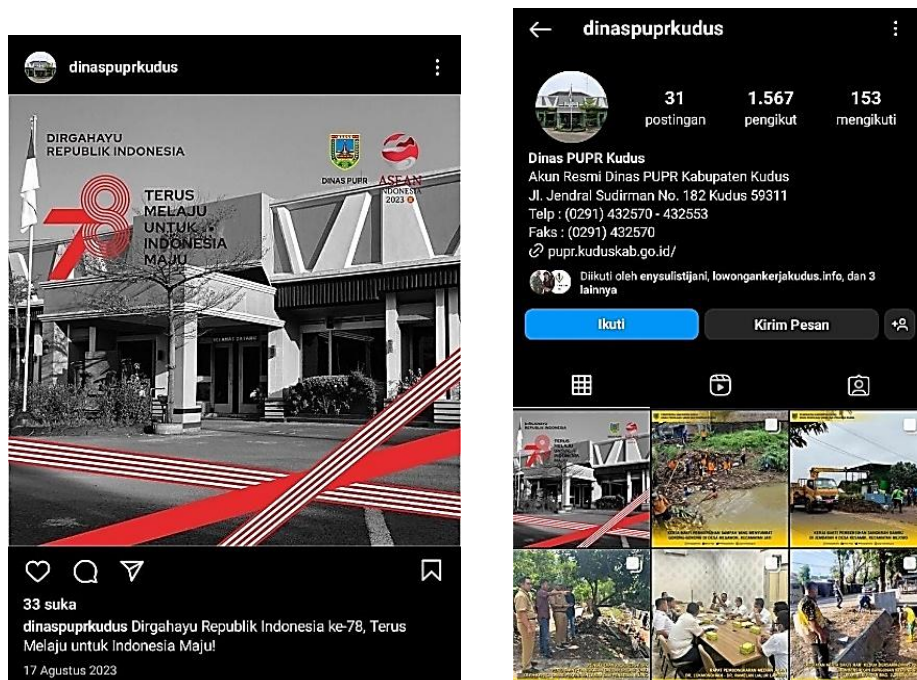
Tangkapan Layar pada Website Dinas PUPR Kabupaten Kudus



Sumber : Website Dinas PUPR Kabupaten Kudus

Gambar 1.7

Tangkapan Layar Instagram Dinas PUPR



Sumber : Akun Instagram @dinasuprkrudus

Dinas PUPR juga belum memiliki mekanisme pertanggungjawaban kinerja kepada publik yang diinformasikan dan dipublikasikan secara rutin. Pada website @pupr.kuduskab.go.id, informasi mengenai kegiatan dan program yang dilakukan dinas PUPR hanya berhenti pada tahun 2022, sedangkan kinerja dan kegiatan dinas PUPR pada tahun 2023 hingga 2024 belum diinformasikan dan diperbaharui. Selain itu akun instagram milik dinas PUPR juga tidak *mengupdate* kebaruan informasi terkait program dan kegiatannya.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamatkan bahwa pelayanan merupakan tugas utama dari seorang aparatur pemerintahan dalam perannya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas aparatur sebagai seorang pelayan publik harus lebih mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan masyarakat dan memberi kepuasan publik (Syahrul & Nasution, 2022).

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan lembaga di tingkat daerah yang menjalankan tugas dan fungsi yang diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum sebagai perwakilan pemerintah pusat yang kehadirannya diharapkan dapat mendorong transformasi pelayanan publik pada arah yang lebih baik. Dinas PUPR merupakan instansi daerah yang memiliki kewenangan, tanggung jawab dan tugas dalam menjalankan otonomi daerah pada sektor pekerjaan umum (Sameldi, 2020). Oleh karena itu agar penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dapat tercapai maka manajemen sumber daya manusia perlu dikelola dengan baik sehingga menghasilkan kinerja yang optimal.

Keberadaan infrastruktur yang memadai memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat seperti kebutuhan akan pangan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu infrastruktur menjadi unsur utama yang sangat penting bagi masyarakat dalam menunjang aktivitas di berbagai bidang. Di samping berfungsi sebagai sarana penghubung antar daerah, infrastruktur juga memiliki hubungan yang erat dengan laju pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Hal tersebut terlihat dari kenyataan bahwa daerah dengan sistem infrastruktur yang lengkap dan dapat digunakan dengan baik cenderung berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya. Tak terkecuali dalam penanggulangan permasalahan banjir, infrastruktur seperti drainase dan gorong-gorong menjadi suatu hal yang penting untuk diperhatikan.

Dinas PUPR berkewajiban untuk memfokuskan upaya pada pemeliharaan, perawatan, serta pemeriksaan rutin terhadap infrastruktur guna menjaga kualitas pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kewajiban ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 12/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan yang mengatur pentingnya pemeliharaan drainase sebagai bagian dari keberlanjutan fungsi infrastruktur publik. Kondisi infrastruktur drainase yang rusak maupun tersumbat sudah seharusnya menjadi perhatian khusus oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus.

Dinas PUPR memang menjadi instansi teknis utama dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur drainase, namun realitas di lapangan menunjukkan

bahwa efektivitas sistem drainase sangat bergantung pada sinergi lintas sektor, termasuk peran dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Oleh karena itu diperlukan adanya dukungan dari sektor lain dalam pengelolaan drainase.

Penumpukan sampah di saluran drainase dan minimnya ruang resapan air karena berkurangnya vegetasi pada wilayah kota merupakan faktor penyebab tersumbatnya saluran yang berujung pada genangan dan banjir. Oleh karena itu, DLHK (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) juga memiliki peran strategis dalam menjaga kebersihan saluran dan meningkatkan daya serap lingkungan melalui penghijauan. Sementara itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga memiliki kontribusi penting. Pada berbagai kasus, kawasan permukiman dibangun tanpa memperhatikan aspek drainase lingkungan. Kurangnya sistem drainase di perumahan padat penduduk serta pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang menyebabkan air hujan tidak memiliki jalur pembuangan yang memadai. Disperkim bertanggung jawab dalam penataan kawasan permukiman, termasuk penyediaan drainase lingkungan, dan pengawasan terhadap perizinan pembangunan agar tidak memperparah risiko banjir.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan drainase di Kabupaten Kudus bukanlah tanggung jawab Dinas PUPR saja, melainkan merupakan tanggung jawab kolektif antara Dinas PUPR, DLHK, Disperkim, serta partisipasi aktif masyarakat. Tanpa kolaborasi yang kuat, pembangunan infrastruktur sebesar apa pun tidak akan mampu menanggulangi permasalahan drainase secara berkelanjutan.

Hal-hal yang sudah disampaikan menjadi data awal bahwa kinerja dinas PUPR dalam upaya pengelolaan drainase sebagai langkah pencegahan banjir masih belum maksimal dan terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Dibuktikan dengan data yang dihimpun dari BPBD yang menunjukkan masih tingginya bencana banjir di Kabupaten Kudus pada awal tahun 2023 yang sudah mencapai 122 kejadian. Kinerja yang kurang optimal dan efisien dapat menyebabkan berbagai faktor penghambat yang bersifat internal maupun eksternal. Melalui penelitian ini diharapkan dapat digali informasi yang berkaitan dengan kinerja dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mengelola drainase di Kabupaten Kudus, dan faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat kinerja dinas PUPR Kabupaten Kudus. Oleh karena itu, judul yang diambil sebagai judul dalam penelitian ini, yaitu “Analisis Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kudus dalam Pengelolaan Drainase sebagai Strategi Pencegahan Banjir.”

1.2 Identifikasi Masalah

1. Permasalahan banjir masih terjadi setiap tahunnya.
2. Banyaknya keluhan dan aduan masyarakat terkait penyumbatan drainase dan banjir.
3. Kondisi infrastruktur drainase yang rusak dan tertutup bangunan.
4. Pemeliharaan infrastruktur drainase yang belum optimal.
5. Kurangnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan drainase.

6. Belum diperbarui mekanisme pertanggungjawaban kinerja dan kegiatan pada website *@pupr.kuduskab.go.id*. dan instagram.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kudus dalam pengelolaan drainase sebagai strategi pencegahan banjir?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kudus dalam pengelolaan drainase sebagai strategi pencegahan banjir?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki prinsip yang bertujuan untuk menjawab permasalahan berdasarkan rumusan masalah tersebut. Dengan demikian berdasar penelitian ini dapat diketahui atau memiliki tujuan penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kudus dalam pengelolaan drainase sebagai strategi pencegahan banjir.

2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kudus dalam pengelolaan drainase sebagai strategi pencegahan banjir.

1.5 Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik dari segi teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan untuk penulis dan pembaca. Hasil dari kegiatan penelitian yang sudah dilakukan diharapkan dapat menjadi salah satu referensi atau acuan terhadap penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan fenomena penelitian.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Temuan dari penelitian ini dapat memperluas pengetahuan peneliti dan digunakan sebagai sarana penyampaian ilmu-ilmu yang didapatkan selama berada dibangku perkuliahan.

2. Bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus

Sebagai bahan masukan serta pertimbangan dalam pelaksanaan kinerja yang lebih baik dan diharapkan bisa menjadi sumbangan alternatif penyelesaian masalah yang ada.

1.6 Kajian Teori

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.5

Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti/Tahun/ Judul Jurnal	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian
1.	Diah Andani. (2022). Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Kabupaten Subang.	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mengelola sumber daya air di wilayah Kabupaten Subang.	Teori Agus Dwiyanto 5 indikator yaitu produktivitas, kualitas, layanan, responsivitas dan akuntabilitas.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan tujuan untuk menggambarkan fenomena secara mendalam dan rinci.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas PUPR dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Kabupaten Subang telah sejalan dengan teori Agus Dwiyanto, khususnya pada aspek produktivitas, di mana terdapat kesesuaian antara rencana dan realisasi capaian kinerja yang dinilai cukup berhasil. Aspek responsivitas juga telah menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan PUPR Kabupaten Subang. Namun, untuk indikator akuntabilitas, masih diperlukan peningkatan lebih

					lanjut di masa mendatang
2.	Jamalia Wahda. (2023). Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam mengelola Drainase di Kota Pekanbaru. <i>INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research</i>	Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan mengevaluasi kinerja Dinas PUPR, sekaligus mengidentifikasi serta menganalisis berbagai permasalahan yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja dinas.	Penelitian ini mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto (2008), dengan menerapkan sejumlah indikator sebagai acuan dalam menilai kinerja, yaitu: produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, serta akuntabilitas.	Metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan bersifat deskriptif.	Kualitas pelayanan Dinas PUPR dalam pengelolaan drainase tercermin dari kegiatan pembersihan yang dilakukan setiap hari di Kota Pekanbaru. Responsivitas dalam melakukan pengelolaan drainase tergolong baik yang terlihat dari respons cepat terhadap laporan masyarakat. Indikator responsibilitas Dinas PUPR dalam pengelolaan drainase di Kota Pekanbaru juga telah dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
3.	Retno Aprilianti Rosa, Dr. Winarti, Joko Suranto. (2022). Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Di Kota Surakarta (Studi Kasus	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta	Teori Kinerja menurut Agus Dwiyanto yang terdiri dari 5 indikator yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas	Metode penelitian kualitatif deskriptif.	Berdasarkan hasil penelitian, kinerja Dinas PUPR Kota Surakarta dalam hal pemeliharaan jalan dan jembatan, khususnya di bidang Bina Marga, dinilai sudah cukup baik . Tingkat produktivitas dalam pencapaian tujuan serta efisiensi dan efektivitas dalam

	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pada Bidang Bina Marga)				pengalokasian anggaran telah berjalan dengan baik. Kualitas pelayanan yang diberikan juga telah sesuai dengan ekspektasi masyarakat, tercermin dari 86% jalan dan 93% jembatan yang berada dalam kondisi layak. Namun, dari segi responsivitas, meskipun telah tersedia media untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, masih banyak warga yang belum mengetahui keberadaan saluran tersebut. Sementara itu, indikator tanggung jawab (responsibilitas) dan akuntabilitas masih belum optimal, terlihat dari kurangnya keterbukaan informasi dan rendahnya transparansi kepada masyarakat.
4.	Saytio Naro Sesa, Retna Hanani, Amni	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk	Menggunakan teori pengukuran kinerja organisasi	Metode penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Suku Dinas

	Zarkasyi Rahman. (2024). Analisis Kinerja Organisasi Suku Dinas Sosial Jakarta Barat dalam Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Terhadap Gelandangan Pengemis.	menganalisis kinerja organisasi Suku Dinas Sosial Jakarta Barat dalam implementasi program rehabilitasi sosial untuk menekan angka gelandangan dan pengemis, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi.	menurut Dwiyanto yang meliputi produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas.	kualitatif deskriptif	Sosial Jakarta Barat dalam sudah berjalan dengan baik meskipun ada indikator yang yang belum optimal yaitu produktivitas dan untuk faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Suku Dinas Sosial dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial adalah faktor team, faktor system, dan faktor kontekstual.
5.	Sinta Syafril dan Sulandari. (2018). Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Semarang.	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menggambarkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menangani bencana banjir, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun yang menghambat kinerja tersebut.	Teori Kinerja Agus Dwiyanto, yaitu Produktivitas, kualitas layanan, responsibilitas, dan akuntabilitas	Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif tipe deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan produktivitas kinerja dinilai belum optimal, mengingat masih ada sejumlah program atau kegiatan yang belum berhasil mencapai target pada setiap fase penanggulangan bencana. Kualitas layanan juga belum mencapai tingkat yang memuaskan. Selain itu, pelaksanaan responsibilitas masih menghadapi berbagai kendala, dan aspek

					akuntabilitas serta transparansi terhadap masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi.
6.	Hardiyanti, K., & Ari Subowo. (2019). Analisis Kinerja Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak Dalam Pengelolaan Sampah. <i>Journal of Public Policy and Management Review</i> , 8(2), 206-221.	Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dalam pengelolaan sampah.	Indikator kinerja birokrasi publik menurut Dwiyanto: 1. Produktivitas 2. Responsivitas 3. Kualitas layanan 4. Responsibilitas 5. Akuntabilitas	Metode Kualitatif Deskriptif	Temuan penelitian menunjukkan bahwa produktivitas kinerja dalam pengelolaan sampah masih belum optimal disebabkan oleh keterbatasan tenaga kerja, sarana dan prasarana serta strategi yang kurang tepat. Kualitas pelayanan juga masih perlu ditingkatkan karena belum mencapai tingkat yang memuaskan. Responsivitas dinilai rendah karena tidak ada sarana maupun kegiatan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat. Sementara itu, aspek responsibilitas belum berjalan dengan baik karena masih terfokus pada pengelolaan TPA Kalikondang serta penyediaan sarana prasarana di wilayah perkotaan dan tidak

					adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat.
7.	Suharyo, & Bandono. (2021). Analysis Of The Performance Of Government Organizations In Realizing Excellent Services In The Public Sector. In <i>Sttal Postgraduate-International Conference</i> .	Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menganalisis faktor pendukung maupun penghambat pelaksanaan kinerja organisasi.	Teori Agus Dwiyanto: 1. Produktivitas 2. Daya tanggap 3. Tanggung jawab 4. Akuntabilitas 5. Kualitas layanan.	Metode kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan indikator produktivitas baik karena terdapat peningkatan target setiap tahunnya. Daya tanggapnya terkendala karena infrastruktur pelayanan yang kurang mendukung seperti kurangnya fasilitas pelayanan pada portal website. Adapun faktor pendukung kinerja dalam yaitu faktor kepemimpinan dan tim dan faktor pengahmbatnya berasal dari pribadi individu.
8.	Fitrianti, B., Heriyanto, M., & Andri, S. (2022). Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Di Kabupaten Kuantan	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan di Kabupaten	Teori Agus Dwiyanto : 1. Produktivitas 2. Responsibilitas 3. Responsivitas 4. Akuntabilitas	Metode deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa produktivitas kinerja Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi dalam kegiatan pemeliharaan infrastruktur jalan telah menunjukkan hasil yang positif. Hal ini tercermin dari peningkatan

	Singingi Tahun 2021.	Kuantan Singingi pada tahun 2021, serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang memengaruhi pelaksanaan kinerja tersebut.			persentase kinerja hingga triwulan kedua. Pada indikator responsibilitas, pelaksanaan pemeliharaan jalan oleh Dinas PUPR sudah mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Sementara itu, pada aspek akuntabilitas, Dinas PUPR menunjukkan komitmennya dengan menyampaikan informasi kepada masyarakat, seperti prosedur layanan, rincian anggaran yang digunakan dalam pemeliharaan jalan, serta laporan anggaran baik per triwulan maupun tahunan atas kegiatan yang telah dilaksanakan.
9.	Ardani, D., & Thamrin, M. H. (2024). Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara dalam	Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara	Teori Agus Dwiyanto: 1. Produktivitas 2. Responsivitas 3. Kualitas layanan 4. Responsibilitas 5. Akuntabilitas	Pendekatan kualitatif	Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dalam hal pemeliharaan jalan di Kecamatan Medan Marelan

	Pemeliharaan Jalan Di Kecamatan Medan Marelan	dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan yang berada di wilayah Kecamatan Medan Marelan.			masih belum maksimal jika ditinjau dari aspek produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, dan responsibilitas. Namun demikian, dari sisi akuntabilitas, pelaksanaannya sudah cukup baik, karena seluruh kegiatan telah terdokumentasi dalam Rencana Usulan Pokok Pikiran DPRD.
10.	Eris Oktani, Budi Suryadi, M. Rinduansyah. (2020). Performance Assessment of Local Government Organizations on Flood Disaster Prevention and Preparedness in Gunung Mas Regency.	Untuk menganalisis kinerja BPBD Gunung Mas dalam pengahan dan kesiapsiagaan bencana.	Penilaian Kinerja menurut aspek : 1. Pemahaman tugas dan fungsi 2. Ketepatan kerja 3. Inovasi 4. Kecepatan Kerja	Metode Kualitatif	Hasil penilaian kinerja BPBD Kabupaten Gunung Mas pada aspek pemahaman tugas dan ketepatan kerja telah dilaksanakan dengan optimal, namun pada aspek inovasi, kecepatan kerja dan kerjasama masih cenderung minim dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang budaya sadae bencana.

Berdasarkan sumber penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penulis mengolah beberapa jurnal yang terdiri dari jurnal nasional dan

jurnal internasional. Lima penelitian jurnal nasional terdahulu diketahui menerapkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan penelitian lima penelitian nasional terdahulu tersebut adalah untuk menganalisis kinerja yang dilakukan oleh organisasi pemerintahan. Kelima penelitian tersebut menggunakan berbagai macam pendekatan ataupun dimensi yang berbeda-beda. Penulis juga menggunakan sumber jurnal internasional dengan tema dan fokus yang hampir sama dengan penelitian ini. Adanya penelitian- penelitian terdahulu tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa topik penelitian yang akan penulis susun memiliki beberapa kesesuaian dengan penelitian nasional terdahulu. Hal yang sama pada penelitian kali ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu memiliki fokus yang serupa yaitu mengenai analisis kinerja organisasi sektor publik. Persamaan selanjutnya adalah mengenai metode penelitian yang akan digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Perbedaan yang tampak antara penelitian yang akan penulis susun dengan penelitian- penelitian terdahulu tersebut adalah pada indikator penilaian yang digunakan. Selain itu penulis juga melakukan pengkajian mengenai analisis kinerja dengan mengambil studi kasus pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Kudus yang belum pernah diteliti secara mendalam sebelumnya. Peneliti juga akan mengidentifikasi secara langsung hambatan dan faktor pendorong yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus dalam pengelolaan drainase sebagai bagian dari strategi pencegahan banjir.

1.6.2 Administrasi Publik

Kata "administrasi" secara etimologis berasal dari bahasa inggris "*administration*," yang dapat diartikan juga sebagai "*to manage*" atau "mengelola. Istilah "administrasi" menurut pendapat (A. Dunsire dalam Keban, 2019) diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan, kegiatan menganalisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan. (Trecker dalam Keban, 2019) juga mendefinisikan kata administrasi sebagai sebuah proses yang dinamis dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan dengan memanfaatkan secara bersama sumber daya manusia dan material didalamnya melalui koordinasi dan kerjasama. Sementara itu, kata "publik" berasal dari bahasa inggris "*public*" yang mengidentifikasikan publik dengan masyarakat secara keseluruhan. Kata "masyarakat" merujuk kepada semua orang dalam lingkup umum yang mencakup seluruh rakyat. Istilah "publik" merujuk pada hal-hal yang bersifat umum atau kepentingan yang dimiliki oleh masyarakat umum. Menurut (Keban, 2019) publik juga dapat diartikan sebagai mereka yang bekerja untuk kepentingan masyarakat luas atau dikenal dengan lembaga pemerintah.

Menurut (Chandler dan Plano dalam Keban, 2019) administrasi publik dapat dipahami sebagai suatu proses pengorganisasian dan pengoordinasian sumber daya dalam lembaga publik yang bertujuan untuk merumuskan, mengimplementasikan, serta mengelola keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik. Pengertian tersebut dapat dianggap sebagai seni dan ilmu yang ditujukan untuk menjalankan berbagai tugas yang telah ditentukan. Menurut (Owen Hughes dalam Keban, 2019) administrasi publik adalah bidang studi akademis yang mempelajari berbagai aspek terkait dengan sektor public. Pengertian

tersebut mengandung arti bahwa administrasi publik dipahami sebagai manajemen yang berperan dalam mendukung pemanfaatan teknologi modern dalam mewujudkan modern *governance*. Pendapat lain juga disampaikan oleh (Nicholas Henry dalam Keban, 2019) yang berpendapat bahwa administrasi publik merupakan kombinasi yang kompleks antara aspek teori dan praktek yang memberikan pemahaman tentang peran pemerintah dalam kaitannya dengan masyarakat yang diperintah.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Paradigma berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu "*paradigm*" yang merujuk pada pola atau contoh. Menurut (Friedrichs dalam Amtai, 2021) paradigma adalah pandangan dasar tentang topik yang seharusnya menjadi fokus dalam suatu disiplin ilmu. Paradigma administrasi publik mencerminkan model atau pola yang menggambarkan fokus dan ruang lingkup bidang administrasi publik yang menggambarkan area dan subjek yang menjadi perhatian dalam bidang administrasi publik. (Nicholas Henry dalam Keban, 2019) menyatakan bahwa paradigma administrasi terdiri dari 6 (enam) bagian.

Paradigma 1 (1900–1926) dikenal dengan sebutan paradigma Dikotomi Politik Administrasi Publik. Paradigma pertama diperkenalkan oleh Leonard D. White dan Frank J. Goodnow. Dalam paradigma ini, terdapat konsep dikotomi antara politik dan administrasi dalam administrasi publik. Artinya politik disini berhubungan dengan kebijakan atau ekspresi dari kehendak rakyat, sedangkan administrasi berfokus pada pelaksanaan dan implementasi kebijakan. Paradigma ini

lebih menekankan tentang *locus* saja sedangkan fokus atau metode kurang dibahas secara rinci.

Paradigma II (1927-1937) disebut sebagai paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi. Paradigma kedua ini mengalihkan fokus dari lokus administrasi publik menjadi penekanan pada penerapan prinsip-prinsip administrasi tertentu. Prinsip-prinsip administrasi tersebut disebut sebagai POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting*). Prinsip tersebut dianggap bersifat universal sehingga dapat diterapkan dimana saja. Lokus dalam paradigma kedua kurang diungkapkan secara jelas karena paradigma ini lebih menekankan pada fokusnya.

Paradigma III (1950-1970) dikenal sebagai paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik. Tokoh-tokoh utama dalam paradigma ini mencakup Chester I. Barnard, Dwight Waldo, Herbert Simon, dan lainnya. Morstein Mark menantang sebuah gagasan bahwa pemisahan antara politik dan administrasi adalah sesuatu yang tidak mungkin. Sementara Herbert Simon memunculkan kembali perdebatan tentang pemisahan antara administrasi dan politik. Paradigma ini juga mengembalikan administrasi publik sebagai bagian dari ilmu politik yang lokusnya adalah birokrasi pemerintahan.

Paradigma IV (1956-1970) dikenal sebagai paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi. Paradigma IV diperkenalkan oleh Herbert Simon, Keith Henderson, James March, dan sejumlah tokoh lainnya. Paradigma administrasi publik berfokus pada teori-teori organisasi dan ilmu manajemen. Fokus paradigma ini yaitu perilaku organisasi, analisis manajemen, dan penerapan teknologi modern.

Tidak ada perbedaan fokus yang signifikan antara administrasi publik dan administrasi bisnis dalam paradigma ini. Keduanya bertujuan untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan produktivitas.

Paradigma V (1970 - saat ini) dikenal dengan paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Perkembangan paradigma ini terlihat pada kejelasan antara fokus dan lokus. Adapun fokus paradigma kelima ini mencakup teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik. Sedangkan masalah-masalah dan kepentingan masyarakat menjadi lokusnya. Paradigma kelima juga memperkenalkan tentang keberadaan *New Public Management* (NPM) dan *New Public Service* (NPM). Pusat perhatian dalam paradigma ini adalah kepentingan dan kesejahteraan publik.

Paradigma VI (1990-sekarang) dikenal sebagai paradigma *Governance*. Paradigma governance menjadi sebuah paradigma baru dalam perkembangan ilmu administrasi publik. Dalam paradigma ini terdapat tiga elemen utama yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Menurut UNDP, *governance* memiliki sejumlah ciri khas yakni mencakup legitimasi politik, kolaborasi dengan lembaga masyarakat sipil, hak untuk berorganisasi dan berpartisipasi, akuntabilitas birokrasi dan keuangan, manajemen sektor publik yang efisien, akses terhadap informasi dan kebebasan berpendapat, serta sistem peradilan yang adil dan dapat dipercaya.

Berdasarkan reformasi administrasi publik, kinerja organisasi merupakan bagian didalam konsep *New Public Manajemen* (NPM). Administrasi publik yang berkembang di dalam *New Public Management* adalah konsep management yang berorientasi kepada kinerja dan upaya menciptakan *good governance*. Pada konsep

NPM, setiap unit kerja diharapkan dapat mengembangkan indikator kinerja yang berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai sejauh mana kemajuan organisasi dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. NPM dalam tata kelola pelayanan publik menghadirkan perubahan pada peningkatan kualitas pelayanan publik agar mencapai kesejahteraan bersama. (Hartati, 2020) menyatakan bahwa dalam pendekatan *New Public Management*, organisasi sektor publik diwajibkan mempunyai arah tujuan yang jelas serta merumuskan capaian kinerja yang spesifik, terukur dan sesuai standat baik bagi tingkat organisasi maupun individu di dalamnya.

Paradigma *New Public Management (NPM)* memiliki sejumlah ciri atau prinsip utama, di antaranya: 1) Penerapan praktik manajemen profesional dalam sektor publik, 2) Penetapan standar kinerja dan tolok ukur yang jelas, 3) Fokus yang lebih kuat pada pengendalian hasil (*output*) dan dampak (*outcome*), 4) Restrukturisasi instansi publik menjadi unit-unit kerja yang lebih kecil, 5) Menciptakan kompetisi dalam lingkungan sektor publik, 6) Pengadopsian gaya manajemen di sektor swasta ke dalam sektor publik, dan 7) Penekanan pada disiplin dan penggunaan sumber daya secara hemat.

1.6.4 Manajemen Publik

Setiap organisasi memerlukan adanya manajemen untuk mengatur proses penyelenggaraan kinerja guna mencapai tujuan organisasi tersebut. Menurut (Handoko dalam Firdausijah et al., 2023), manajemen merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan

pengawasan terhadap berbagai aktivitas anggota organisasi serta pemanfaatan sumber daya organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

(Stoner dalam Anto et al., 2022) mendefinisikan manajemen sebagai proses yang melibatkan penyusunan rencana, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian anggota organisasi serta penggunaan sumber daya organisasi secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kedua definisi tersebut menjelaskan bahwa manajemen adalah serangkaian proses menyeluruh dalam mengatur jalannya organisasi yang mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian serta pengelolaan sumber daya yang dimiliki organisasi. Manajemen berperan penting agar organisasi dapat berjalan secara efektif dalam mencapai target atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pada instansi pemerintah khususnya yang memberikan layanan kepada masyarakat, perlu adanya manajemen yang efektif dan efisien dalam menyelenggarakan proses pelayanan agar dapat berlangsung secara maksimal dan menciptakan kepuasan publik sebagai tujuan utamanya. Manajemen publik sendiri merujuk pada konsep yang berfokus pada kepentingan umum dan masyarakat luas.

Adapun pengertian manajemen publik menurut para ahli dalam buku *Manajemen Sektor Publik* yang ditulis oleh (Firdausijah et al., 2023) yaitu:

- a. Manajemen Publik menurut Shafritz dan Russel diartikan sebagai usaha individu untuk bertanggungjawab dalam mengelola sebuah organisasi serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya, baik manusia maupun peralatan guna mencapai tujuan organisasi.

- b. Donovan dan Jackson (1991:11-12) menjelaskan bahwa manajemen publik merupakan serangkaian kegiatan yang dijalankan dengan menggunakan berbagai keterampilan khusus atau *skill*.
- c. Menurut Yeremias T. Keban, manajemen publik diartikan sebagai usaha yang mengacu pada manajemen instansi pemerintah.
- d. Menurut Ott, Hyde dan Shafritz (1990) mengartikan bahwa manajemen publik adalah proses yang menitikberatkan pada cara organisasi publik mengimplementasikan kebijakan publik yang telah disetujui bersama.

Pengertian manajemen publik menurut para ahli diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa manajemen publik adalah pengelolaan adanya sumber-sumber daya yang dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penyelenggaraan manajemen publik dinilai turut mewarnai keberhasilan keberhasilan pengelolaan sektor publik sehingga dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pemenuhan kepentingan masyarakat dan menyelesaikan permasalahan publik. Itulah sebabnya, hadirnya manajemen publik dinilai penting dalam memberikan penguatan terhadap efektivitas pengelolaan sektor-sektor publik.

1.6.5 Manajemen Kinerja

Manajemen kinerja merupakan serangkaian proses yang meliputi perencanaan kinerja, pemantauan atau evaluasi kinerja, penilaian hasil kerja serta tindak lanjut berupa pemberian penghargaan dan hukuman (Bahiroh, 2024). Kinerja sering kali diartikan sebagai pencapaian atau hasil kerja yang diperoleh, baik oleh

individu, tim, maupun sebuah organisasi. Kinerja berperan sebagai penghubung yang menyatukan berbagai kegiatan organisasi dalam menjalankan strategi guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Terdapat pengertian manajemen kinerja menurut beberapa ahli diantaranya yaitu menurut (Aguinis dalam Wehelmina, 2021) menyatakan bahwa manajemen kinerja adalah proses yang berlangsung secara terus-menerus untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengembangkan kinerja individu maupun tim sekaligus memastikan keselarasan kinerja dengan dengan tujuan strategis organisasi. Menurut (Baird dalam Sandy et al., 2022) manajemen kinerja adalah suatu proses kerja yang dilakukan oleh sejumlah individu untuk mencapai tujuan tertentu, dimana proses kerja ini berlangsung secara terus-menerus dan berkelanjutan. Sementara itu, (Dessler dalam Marwan et all, 2020) mengungkapkan bahwa manajemen kinerja adalah proses mengintegrasikan penetapan tujuan, penilaian, dan pengembangan kinerja ke dalam satu sistem terpadu dengan tujuan untuk memastikan bahwa kinerja individu selaras dengan pencapaian tujuan organisasi.

Manajemen kinerja saling berhubungan antara satu dengan yang lain sehingga terdapat 4 (empat) tahapan utama dalam pelaksanaannya. Adapun tahapan manajemen kinerja menurut (Williams dalam Yuningsih, 2018) yaitu :

1. Tahap *directing* atau *planning*

Tahap perencanaan atau *planning* merupakan langkah awal yang melibatkan identifikasi perilaku kerja serta penentuan dasar untuk mengukur kinerja. Selanjutnya, dilakukan pengarahan yang jelas terhadap

perilaku kerja serta penyusunan rencana terkait target yang ingin dicapai, waktu pencapaiannya, dan jenis bantuan yang diperlukan.

2. Tahap *managing* atau *supporting*

Tahap *managing* merupakan tahap pemantauan terhadap proses organisasi. Pada tahap ini, fokus utama adalah mengelola, memberi dukungan, serta mengendalikan pelaksanaan proses agar tetap sesuai dengan jalur yang telah ditetapkan. Jalur tersebut mengacu pada standar, kriteria, dan prosedur yang berlaku dalam organisasi.

3. Tahap *review* atau *appraising*

Tahap ketiga melibatkan proses evaluasi. Evaluasi dilakukan melalui proses peninjauan kembali atau mengkaji kembali kinerja yang telah dilaksanakan. Setelah itu, kinerja akan dinilai dan diukur. Tahap *review* membutuhkan adanya dokumentasi dan pencatatan data yang berkaitan dengan obyek yang akan dievaluasi.

4. Tahap *developing* atau *rewarding*

Tahap keempat menitikberatkan pada aspek pengembangan dan pemberian penghargaan. Hasil dari evaluasi sebelumnya digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya. Keputusan tersebut dapat berupa langkah perbaikan kinerja, pemberian penghargaan atau sanksi, serta penetapan anggaran.

Adapun jenis-jenis kinerja terbagi menjadi 3 (tiga), antara lain:

1. Kinerja Program

Kinerja program merujuk pada efektivitas suatu program atau proyek dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja program dapat diukur berdasarkan pencapaian hasil, dampak, efisiensi penggunaan sumber daya, dan kualitas output dari program yang telah dilaksanakan tersebut.

2. Kinerja Organisasi

Kinerja organisasi mengacu pada kemampuan suatu organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya dengan memanfaatkan dan menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Kinerja organisasi dapat diukur melalui berbagai aspek seperti kepuasan pelanggan, inovasi, keberlanjutan, produktivitas, dan kualitas layanan atau produk.

3. Kinerja Individu

Kinerja individu berkaitan dengan pencapaian atau performa seseorang individu dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan standar atau target yang telah ditetapkan dalam suatu pekerjaan. Kinerja individu dapat diukur dengan melihat aspek seperti keterampilan, produktivitas, disiplin, kreativitas, serta kontribusi terhadap tujuan organisasi.

Ketiga jenis kinerja saling berkaita antara satu dengan yang lain. Kinerja individu dapat mempengaruhi kinerja organisasi, sementara keberhasilan program akan berdampak pada pencapaian keseluruhan tujuan organisasi.

1.6.6 Kinerja Organisasi

Kinerja merupakan topik penting pada suatu organisasi karena kinerja berperan sebagai faktor utama dalam menentukan keberhasilan dan efektivitas organisasi. Suatu organisasi dapat dikatakan berhasil dan efektif apabila individu-individu di dalamnya menunjukkan kinerja yang optimal. Adapun pengertian kinerja menurut menurut (Anjasmari & Nor'aini, 2023) adalah pencapaian hasil kerja dilihat dari segi kualitas dan kuantitas yang diperoleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Menurut Prawirosentono dalam (Anjasmari & Nor'aini, 2023) kinerja merupakan capaian hasil kerja oleh individu maupun kelompok yang dilakukan berdasarkan wewenang dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan tujuan organisasi tanpa melanggar ketentuan hukum serta menjunjung tinggi nilai moral dan etika. Riadi (2020) memberikan pemahaman mengenai kinerja yaitu sebagai bentuk keberhasilan personilm tim, maupun unit organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan.

Organisasi adalah sekelompok individu yang dengan sengaja dipersatukan dalam suatu kerjasama yang terstruktur dan efisien untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan (Fithriyyah, 2021). Menurut (Gerlof dalam Syafril & Sulandari, 2018) menyatakan bahwa organisasi memiliki 3 karakteristik yaitu terdiri dari *purpose*, *people*, dan *plan*. Sesuatu tidak dapat disebut organisasi bila tidak

memiliki tujuan (*purpose*), anggota (*people*), dan rencana (*plan*). Setiap individu dalam organisasi memiliki peran, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi yang bersangkutan.

Pengertian kinerja dan organisasi diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa kinerja organisasi adalah kualitas hasil kerja organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang berpedoman pada norma, standar operasional prosedur, dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi. Kinerja organisasi tidak hanya dilihat dari seberapa jauh tujuan dapat dicapai, tetapi juga mencakup bagaimana proses pelaksanaannya berlangsung dan sejauh mana sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi. Dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut maka terdapat sistem pembagian kerja, pembagian waktu, dan koordinasi yang bertujuan untuk menghindari adanya dari pemborosan serta masalah-masalah.

1.6.7 Pengukuran Kinerja

Leilasariyanti (2025) mendefinisikan pengukuran kinerja merupakan kegiatan untuk menilai sejauh mana pencapaian target telah selaras dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan oleh organisasi. (Whittaker dalam Ferine, 2024) juga menyatakan bahwa pengukuran kinerja berfungsi sebagai instrumen manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Berdasarkan pendapat beberapa ahli maka dapat dipahami bahwa pengukuran kinerja adalah suatu cara atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai hasil pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga nantinya dapat diketahui tingkat kemajuan atau

keberhasilan organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Pengukuran kinerja pada organisasi publik memiliki peranan yang penting karena pelaksanaan kinerja organisasi berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan serta kepentingan masyarakat luas.

Terdapat berbagai macam dimensi dalam pengukuran kinerja organisasi yang dikemukakan oleh para ahli yaitu salah satunya menurut Agus Dwiyanto. Buku berjudul Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia yang ditulis oleh (Dwiyanto et al., 2012) menyebutkan terdapat beberapa indikator yang bisa digunakan dalam menilai kinerja organisasi publik diantaranya yaitu:

1. Produktivitas

Produktivitas merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas pelayanan. Konsep produktivitas dapat diartikan juga sebagai seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dan output. Indikator produktivitas mengukur perbandingan antara keseluruhan hasil yang diperoleh (*output*) dengan seluruh sumber daya yang digunakan (*input*) dalam suatu periode waktu tertentu.

2. Kualitas pelayanan

Kualitas pelayanan merupakan indikator yang penting dalam mengukur kinerja organisasi publik. Hal ini dikarenakan kualitas pelayanan mengukur tentang bagaimana kepuasan masyarakat terhadap kinerja yang diberikan oleh organisasi publik. Kepuasan masyarakat menjadi hal yang penting dalam mengukur kinerja organisasi karena saat ini banyak

ditemukan pandangan negatif mengenai pelayanan yakni adanya ketidakpuasan masyarakat. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima dapat digunakan untuk menilai kualitas suatu pelayanan.

3. Responsivitas

Menurut (Dwiyanto et al., 2012) responsivitas merupakan kemampuan birokrasi dalam mengenali kebutuhan masyarakat, menetapkan agenda prioritas pelayanan, serta merancang program-program pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Responsivitas dapat diukur dan dinilai dengan bagaimana organisasi publik mampu menanggapi dan menyelesaikan masalah, gagasan, dan kritik masyarakat. Responsivitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan organisasi dalam memberikan tanggapan secara cepat dan tepat terhadap berbagai kebutuhan masyarakat sesuai dengan harapan yang mereka inginkan. Responsivitas yang rendah ditandai dengan adanya ketidakselarasan antara pelayanan yang diberikan dengan kebutuhan masyarakat.

4. Responsibilitas

Responsibilitas adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan kegiatan dalam organisasi publik telah sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau kebijakan yang berlaku dalam organisasi tersebut.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah suatu bentuk tanggung jawab atas keberhasilan maupun kegagalan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi serta misi dari organisasi (Adisasmita dalam Grasia et al., 2023). Hal ini berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan pelayanan publik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat umum dan kepada pemerintah. Akuntabilitas dapat didefinisikan pula sebagai kewajiban instansi publik untuk mengawasi dan mengarahkan penggunaan kebijakan dan sumber daya secara konsisten agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut (Robins dalam Nurhalimah & Amirulmukminin, 2023) yang turut menyatakan bahwa terdapat empat aspek yang bisa dijadikan acuan dalam melakukan pengukuran terkait sejauh mana pencapaian kinerja organisasi. Keempat aspek atau dimensi tersebut antara lain:

1. Kualitas adalah tingkat baik buruknya pelayanan, tingkat kesalahan dan kerusakan serta kecermatan.
2. Kuantitas diartikan sebagai jumlah ukuran nilai atau jumlah dari pekerjaan yang dilakukan.
3. Ketepatan waktu yaitu tingkat keefektifan waktu kerja, tingkat ketidakhadiran serta keterlambatan.
4. Efektivitas adalah suatu kondisi yang menunjukkan sejauh mana tingkat keberhasilan atau pencapaian tujuan yang diukur berdasarkan aspek kualitas, kuantitas dan waktu serta kesesuaiannya dengan rencana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pandangan dari kedua ahli mengenai kinerja organisasi dapat disimpulkan bahwa kinerja organisasi merupakan hasil dari serangkaian upaya kolektif yang dilakukan oleh seluruh anggota organisasi dalam rangka mencapai tujuan kerja tertentu. Proses ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal baik dari lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Mengacu pada teori-teori yang telah dijelaskan oleh beberapa ahli, maka penelitian ini menggunakan kerangka teori kinerja organisasi yang dikembangkan oleh Agus Dwiyanto sebagai acuan analisis utama. Berdasarkan teori penilaian kinerja yang dikemukakan oleh Dwiyanto, peneliti memutuskan memilih indikator produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Penulis memilih indikator-indikator tersebut karena dianggap lebih tepat dalam mengukur kinerja Dinas PUPR Kabupaten Kudus.

Teori Kinerja Organisasi Agus Dwiyanto juga memiliki keterkaitan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan. Regulasi tersebut menjelaskan mengenai bagaimana proses perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengendalian sistem drainase agar berfungsi optimal. Regulasi ini menjadi landasan formal bagi Dinas PUPR dan instansi terkait dalam menjalankan tugasnya. Adapun keterkaitan teori dengan regulasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.6
Matriks Hubungan Teori Kinerja Organisasi dengan Regulasi

No.	Teori Kinerja Organisasi Agus Dwiyanto (2012)	Keterkaitan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 dengan Teori
1.	Produktivitas	Permen PUPR No. 12 Tahun 2014 mengatur standar penyelenggaraan sistem drainase yang meliputi perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan yang harus dilakukan secara optimal dan tepat waktu. Hal ini berkaitan dengan produktivitas organisasi dalam menghasilkan output kinerja berupa sistem drainase yang berfungsi baik sesuai target yang ditetapkan.
2.	Kualitas Pelayanan	Pada Permen PUPR No. 12 Tahun 2014 pada pasal 22 menetapkan adanya standar teknis dan prosedur yang harus dipatuhi agar sistem drainase berfungsi dengan baik, sehingga kualitas layanan kepada masyarakat terjamin. Kualitas layanan ini tercermin dari kemampuan sistem mengurangi genangan dan banjir serta harus ada kegiatan pemeliharaan yang rutin.
3.	Responsivitas	Regulasi mengatur mekanisme pemantauan, penanganan, dan pelaporan masalah drainase, sehingga instansi terkait harus cepat tanggap terhadap keluhan dan perubahan kondisi di lapangan. Responsivitas ini penting agar pelayanan dapat menyesuaikan kebutuhan masyarakat.

4.	Responsibilitas	Pada Permen PUPR No. 12 Tahun 2014 pasal 11 dan 12 mewajibkan adanya standar kelayakan dan perencanaan teknis pada sistem drainase perkotaan. Peraturan tersebut mewajibkan setiap pelaksana kegiatan drainase untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sesuai regulasi dan prosedur. Hal ini menuntut organisasi dan pegawai untuk memegang teguh tanggung jawab administratif dan teknis dalam pengelolaan drainase.
5.	Akuntabilitas	Pada Permen PUPR No. 12 Tahun 2014 pada pasal 28 mengharuskan adanya dokumentasi, pelaporan, dan pengawasan yang jelas atas pelaksanaan sistem drainase. Dengan demikian, maka kinerja dinas dalam pengelolaan drainase wajib mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran, proses pekerjaan, dan hasilnya kepada publik maupun pemerintah.

1.6.8 Faktor Pendorong dan Penghambat Kinerja Organisasi

Kinerja organisasi adalah hasil pencapaian suatu organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan tujuan organisasi yang telah ditetapkan pada jangka waktu tertentu.

Menurut (Mahmudi, 2015) terdapat 5 indikator yang mempengaruhi kinerja organisasi, diantaranya:

a. Faktor personal

Faktor personal adalah sesuatu yang melekat pada diri seseorang individu yang mempengaruhi perilaku. Faktor personal mencakup aspek-aspek seperti pengetahuan, keterampilan, kemampuan, rasa percaya diri, motivasi, serta tingkat komitmen yang dimiliki oleh masing-masing individu.

b. Faktor kepemimpinan

Faktor kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengarahkan, mengatur, serta mempengaruhi pikiran dan perilaku bawahan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Faktor kepemimpinan berkaitan dengan kemampuan pemimpin dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan.

c. Faktor tim

Tim adalah sekelompok individu dengan keahlian atau keterampilan yang sama untuk saling melengkapi dan memiliki komitmen bersama untuk meraih tujuan yang telah disepakati. Indikator atau faktor tim berkaitan dengan proses kerja sama yang saling bertanggungjawab atas tugas dan fungsinya. Faktor tim meliputi sejauh mana dukungan dan semangat diberikan antar anggota, kepercayaan terhadap sesama anggota serta kekompakan dan kedekatan hubungan dalam tim.

d. Faktor sistem

Faktor sistem merujuk pada sejumlah komponen yang saling berhubungan dan berfungsi secara bersama-sama guna mewujudkan tujuan

yang telah ditetapkan oleh organisasi. Faktor sistem mencakup sistem kerja, sarana atau infrastruktur yang disediakan oleh organisasi, alur proses organisasi, serta budaya kinerja yang berkembang di dalam organisasi.

(Soesilo dalam Alam, 2021) juga menyebutkan bahwa kinerja organisasi dapat dipengaruhi oleh adanya beberapa faktor diantaranya sebagai berikut :

1. Struktur organisasi merupakan suatu hubungan internal yang mengatur pembagian fungsi-fungsi dalam menjalankan aktivitas organisasi.
2. Kebijakan pengelolaan mencerminkan arah dan tujuan organisasi yang dituangkan melalui visi dan misi organisasi.
3. Sumber daya manusia berkaitan dengan kompetensi dan kemampuan pegawai dalam memberikan kontribusi kerja secara optimal.
4. Sistem informasi manajemen berhubungan dengan pengelolaan data dan informasi yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas kinerja organisasi.
5. Sarana dan prasarana berhubungan dengan pemanfaatan teknologi dan fasilitas penunjang dalam mendukung kelancaran setiap kegiatan organisasi.

Kinerja suatu organisasi dipengaruhi oleh beragam faktor, termasuk faktor-faktor yang dapat mendorong maupun faktor yang dapat menghambatnya. Faktor tersebut dapat berasal dari faktor internal organisasi maupun eksternal organisasi. Faktor tersebut dapat mempengaruhi proses dalam mencapai tujuan organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan faktor personal, tim, kepemimpinan, dan sistem untuk mengetahui

faktor pendorong dan penghambat kinerja dinas PUPR Kabupaten Kudus dalam pengelolaan drainase sebagai strategi pencegahan banjir.

1.6.9 Pengelolaan Drainase

Istilah drainase berasal dari kata kerja bahasa Inggris "*to drain*" yang berarti mengalirkan atau mengeringkan air. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan sistem yang berfungsi mengatasi penanganan masalah kelebihan air, baik yang berada di permukaan tanah maupun yang berada di bawahnya (Salsabila, 2021). Drainase juga diartikan sebagai proses mengalirkan, menguras, atau membuang air. Menurut (Salsabila, 2021) drainase dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan teknis untuk mengurangi kelebihan air, baik yang berasal dari air hujan, rembesan maupun kelebihan air irigasi dari suatu kawasan atau lahan, sehingga fungsi kawasan tidak terganggu.

Drainase juga bisa diartikan sebagai saluran untuk mengendalikan kualitas air tanah terutama berkaitan dengan kadar salinitas. Sistem saluran drainase mencakup pengelolaan baik air permukaan maupun air tanah. Sistem jaringan drainase di suatu wilayah seharusnya dirancang untuk mampu menampung debit aliran air dalam jumlah normal terutama saat musim hujan. Artinya kapasitas saluran drainase harus sudah diperhitungkan agar dapat menampung volume air yang ada sehingga wilayah tersebut terhindar dari genangan atau banjir. Apabila kapasitas saluran drainase menurun akibat berbagai faktor maka drainase tersebut tidak akan mampu menampung aliran air dalam jumlah normal sekalipun.

Pengelolaan drainase adalah serangkaian kegiatan pemeliharaan dan perawatan saluran drainase guna mencegah terjadinya masalah atau gangguan pada saluran tersebut. Pengelolaan merupakan upaya pemeliharaan untuk mempertahankan hasil dari aktivitas yang telah dijalankan sebelumnya. Saat ini, sistem drainase menjadi salah satu infrastruktur vital di perkotaan dan kualitas drainase sangat dipengaruhi oleh kondisi keseluruhan sistem kota itu sendiri.

Adapun fungsi drainase dalam buku yang berjudul “Penataan Drainase Perkotaan” yang ditulis oleh Mulyanto menjelaskan terdapat beberapa fungsi drainase yaitu sebagai berikut :

a. Tempat pembuangan air berlebih

Drainase berfungsi sebagai saluran yang mengalirkan air yang berlebih menuju tempat pembuangan akhirnya, seperti sungai, danau, atau laut sebagai perairan terbuka. Fungsi utama dari drainase ini adalah untuk menghindari terjadinya genangan air di kawasan perkotaan maupun di saluran-saluran yang menjadi bagian dari sistem drainase.

b. Mengalirkan limbah serta membersihkan polusi dari wilayah perkotaan

Pada daerah perkotaan tertumpuk bahan polutan berupa debu dan sampah organik yang berpotensi mencemari lingkungan hidup. Oleh air hujan yang jatuh, polutan akan terbawa ke dalam sistem drainase dan dialirkan pergi sambil dinetralisir secara alami. Secara alami suatu badan air seperti sungai, saluran drainase mempunyai kemampuan untuk menetralisasi cemaran yang memasuki atau terbawa alirannya sehingga tidak mencemari lingkungan.

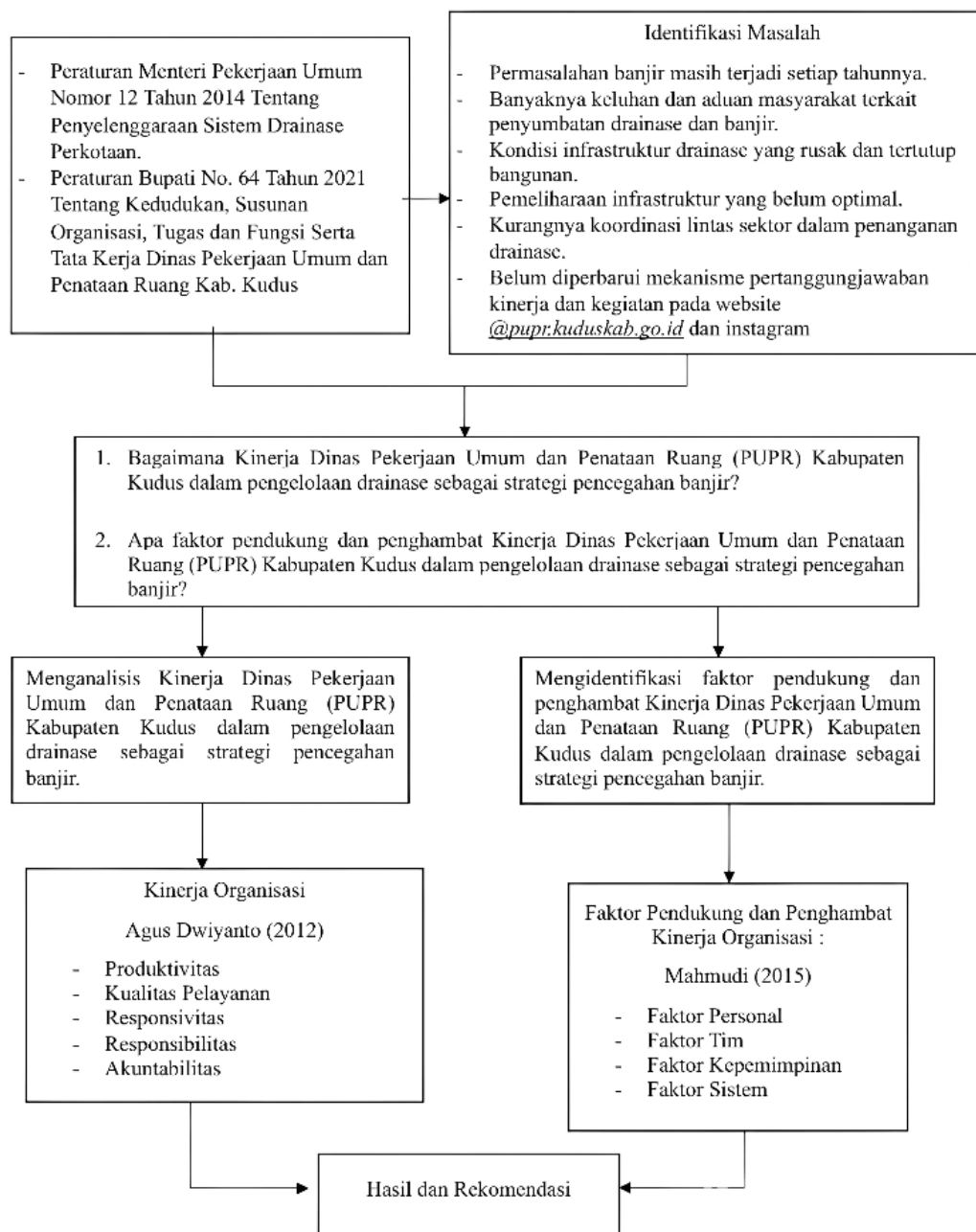
c. Mengatur arah dan kecepatan aliran

Air buangan berupa air hujan dan limbah harus diatur alirannya melewati sistem drainase dan diarahkan ke tempat penampungan akhir atau perairan di mana sistem drainase bermuara. Arah aliran akan ditentukan melewati sistem drainase sehingga tidak menimbulkan kekumuhan di sekitar pemukiman warga.

1.6.10 Kerangka Pikir Penelitian

Tabel 1.7

Kerangka Berfikir



1.7 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep adalah tahap di mana peneliti mencoba menjelaskan pengertian dan ciri-ciri dari konsep yang dipakai dalam penelitian serta bagaimana konsep tersebut dapat diterapkan secara praktis. Pokok bahasan yang akan diteliti yaitu analisis kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus dalam pengelolaan drainase sebagai strategi pencegahan banjir. Kinerja adalah hasil dari suatu pekerjaan yang berhasil dicapai oleh seseorang atau kelompok pada suatu organisasi berdasarkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang telah diberikan.

Penelitian ini memfokuskan pada 5 (lima) dimensi kinerja yaitu produktivitas, kualitas pelayanan, *responsivitas*, responsibilitas dan akuntabilitas yang akan digunakan untuk mengukur kinerja dinas PUPR Kabupaten Kudus dalam pengelolaan drainase sebagai strategi pencegahan banjir.

Tabel 1.8
Operasionalisasi Konsep

No.	Fokus	Gejala	Sub Gejala
1.	Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)	1. Produktivitas	- Efektivitas pelaksanaan kegiatan. - Capaian Kegiatan Organisasi.
		2. Kualitas Pelayanan	- Kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan. - Kompetensi dan keahlian pelaksana

No.	Fokus	Gejala	Sub Gejala
	Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)	3. Responsivitas	- Kecepatan merespon permintaan dan keluhan masyarakat. - Ketersediaan saluran komunikasi dan pengaduan. - Pelibatan masyarakat
		4. Responsibilitas	- Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan Organisasi dengan Prinsip-Prinsip Administrasi yang Benar atau Sesuai Kebijakan Organisasi
		5. Akuntabilitas	- Bentuk pertanggungjawaban tugas dan program organisasi. - Keterbukaan Informasi
2.	Faktor - faktor yang mempengaruhi kinerja dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)	1. Faktor Personal	- Keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki pegawai. - Komitmen yang dimiliki pegawai.
		2. Faktor Kepemimpinan	- Motivasi dan dorongan yang diberikan pemimpin kepada pegawai. - Arahan yang diberikan pemimpin.
		3. Faktor Tim	- Koordinasi dan kerjasama antar pegawai. - Bentuk pengawasan dan evaluasi yang dilakukan dalam organisasi.
		4. Faktor Sistem	- Anggaran - Fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan organisasi.

1.8 Argumen Penelitian

Penilaian kinerja adalah suatu kegiatan yang penting dan berfungsi sebagai alat untuk mengukur sejauh mana suatu organisasi berhasil mencapai tujuan dan misinya (Dwiyanto et al., 2012). Adanya penilaian terhadap kinerja, maka upaya

untuk memperbaiki kinerja suatu organisasi dapat lebih terarah dan sistematis (Dwiyanto et al., 2012). Upaya pemeliharaan drainase dalam rangka menyelesaikan permasalahan banjir di Kabupaten Kudus membutuhkan peran dan keterlibatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk memastikan pembangunan sarana dan prasarana yang ada telah berjalan dengan baik dan optimal. Dengan adanya kinerja yang baik dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan mengenai ketataruangan.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tanggung jawab dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang kota di Kabupaten Kudus, maka Dinas PUPR perlu menjalankan pengelolaan yang optimal. Salah satu bentuk pengelolaan yang dilakukan adalah melalui kegiatan pemeliharaan seperti pembersihan sampah yang menyumbat saluran drainase. Penumpukan sampah ini dapat menimbulkan masalah serius jika tidak ditangani secara tepat. Terkait persoalan sampah yang menumpuk dan masuk ke dalam saluran drainase, diperlukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Banyak masyarakat menyampaikan keluhan bahwa saat hujan lebat, air tidak dapat mengalir dengan lancar akibat tersumbatnya mulut saluran oleh sampah, sehingga menyebabkan genangan di jalan dan rumah warga, bahkan memicu terjadinya banjir.

Penulis beragumen bahwa masalah yang muncul dikarenakan produktivitas dinas PUPR yang masih rendah dan kurangnya sistem pemeliharaan serta pengawasan. Kinerja yang ditunjukkan oleh dinas PUPR masih belum mampu

mengatasi permasalahan drainase yang tersumbat sehingga banjir masih sering terjadi di Kabupaten Kudus. Lebih lanjut (Asmike & Sari, 2022) mengatakan apabila tidak ada evaluasi atau pengukuran kinerja maka akan sulit untuk mengidentifikasi penyebab maupun hambatan yang mengakibatkan kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan.

Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus memiliki relevansi dengan indikator kinerja Agus Dwiyanto. Pada pasal 29 dijelaskan bahwa Bidang Tata Bangunan dan Drainase memiliki beberapa tugas dan fungsi. Gejala produktivitas relevan dengan tugas yang seharusnya dilakukan oleh Dinas PUPR yaitu bertanggung jawab untuk menyusun rencana, program, kegiatan, dan anggaran yang berkaitan dengan tata bangunan dan sistem drainase. Gejala produktivitas nantinya akan mengukur sejauh mana hasil atau output yang diperoleh dalam kaitannya dengan input dan sumber daya yang digunakan. Peraturan Bupati Kabupaten Kudus No.64 Tahun 2021 juga menuntut dinas PUPR untuk *responsif* terhadap permasalahan publik. Hal ini terlihat pada tugas dinas PUPR bidang drainase yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan dan fasilitasi penyediaan infrastruktur yang layak serta menyelenggarakan pengelolaan drainase yang terhubung langsung dengan sungai.

Dinas PUPR juga perlu meningkatkan akuntabilitas sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas serta pengelolaan sumber daya kepada publik dan atasan. Hal ini telah tercantum di dalam tugas dan fungsi dinas PUPR bidang tata bangunan dan drainase yaitu menyusun laporan pelaksanaan

tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan. Tugas lain dari dinas PUPR yaitu mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tertentu serta berkomitmen untuk bertindak sesuai dengan ketentuan merupakan salah satu prinsip *responsibilitas* dalam pelaksanaan kinerja. Adanya kesesuaian antara tugas dan fungsi Dinas PUPR dengan indikator kinerja Agus Dwiyanto inilah yang nantinya akan diteliti untuk melihat apakah Dinas PUPR khususnya Bidang Tata Bangunan dan Drainase telah bekerja sesuai dengan standar kinerja yang baik. Oleh karena itu riset ini sangat penting dan bermanfaat untuk dilakukan.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, agar penulis dapat menggali dan menganalisis data dengan mendalam. Menurut (Sugiyono, 2022) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada kualitas atau kedalaman data yang dapat diperoleh. Dengan metode ini diharapkan peneliti memperoleh informasi berdasarkan pendapat dan pengalaman responden untuk menjadi sumber data penelitian. Penelitian ini juga mengadopsi pendekatan deskriptif, yang membantu dalam menjelaskan dan menggambarkan fenomena yang diteliti dengan rinci dan mendalam. Pendekatan deskriptif untuk memperoleh gambaran suatu fenomena dan digunakan untuk mendeskripsikan laporan yang diperoleh dari para responden. Pada pendekatan ini terdapat upaya untuk mendeskripsikan, mencatat, dan menganalisis suatu keadaan dan permasalahan yang terjadi di lapangan.

Pada penelitian ini, peneliti berupaya untuk menjelaskan analisis kinerja serta mengenali faktor-faktor yang memengaruhinya mencakup faktor pendukung dan penghambat kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus dalam pengelolaan sistem drainase sebagai upaya strategi dalam pencegahan banjir. Pendekatan kualitatif dipilih dalam penelitian ini karena dinilai lebih sesuai dan relevan dengan karakteristik permasalahan yang diteliti mengingat permasalahan infrastruktur drainase merupakan aspek penting dan sangat kompleks dalam meminimalisir banjir.

1.9.2 Situs Penelitian

Situs atau lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan (Nurgiansah, 2018). Lebih lanjut (Nasution dalam Nurgiansah, 2018) menyatakan bahwa situs penelitian merujuk pada konsep lokasi sosial yang terdiri dari tiga ciri utama, yaitu pelaku, lokasi, dan aktivitas yang dapat diamati secara langsung. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka situs penelitian ini adalah di Kabupaten Kudus, tepatnya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 182, Rendeng, Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu yang memberikan informasi terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam pelaksanaan penelitian yang sedang dilakukan. Subjek penelitian merujuk pada individu, kelompok, atau pihak yang menjadi sumber informasi terkait fenomena dan masalah yang akan diteliti. Teknik *purposive sampling* digunakan pada penelitian ini untuk memilih subjek yang

sesuai berdasarkan pertimbangan tertentu. Menurut (Sulistiyo, 2021) *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang bersifat selektif atau subjektif karena teknik pengambilan sampel mempertimbangan penilaian peneliti dalam menentukan unit (misalnya orang, kasus, organisasi, peristiwa) yang relevan untuk dipelajari. Sedangkan menurut (Sugiyono, 2022) teknik *purposive sampling* adalah teknik dalam menentukan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap mampu memberikan data secara maksimal. Peneliti juga menggunakan teknik *snowball sampling* yaitu teknik yang menggunakan sedikit sumber data dalam pengambilan sampel dan mengalami perkembangan seiring proses pengambilan data (Sugiyono, 2022). Teknik *snowball sampling* digunakan apabila data awal kurang dalam memenuhi kebutuhan penelitian, sehingga diperlukan data tambahan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka informan atau subjek yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1.9

Subjek Penelitian

No.	Subjek Penelitian	Alasan Pemilihan
1.	Kepala Bidang Tata Bangunan dan Drainase	Kepala Bidang dipilih karena bertanggung jawab atas semua kegiatan drainase dan mengetahui terkait arah kebijakan serta pelaksanaan pengelolaan drainase.
2.	Sub Koordinator Tata Bangunan dan Drainase	Sub Koordinator punya peran teknis dan banyak terlibat langsung di lapangan, jadi bisa menjelaskan kondisi nyata dan kendala teknis.

No.	Subjek Penelitian	Alasan Pemilihan
3.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Pemukiman	Alasan pemilihan karena karena pekerjaan informan berkaitan dengan pengelolaan wilayah dan pembangunan drainase.
4.	Staff Bidang Tata Bangunan dan Drainase	Dipilih karena mereka yang langsung mengerjakan tugas di lapangan, jadi memahami secara betul bagaimana proses kerja dan tantangan sehari-hari.
5.	Staff Bidang Tata Bangunan dan Drainase	Dipilih karena mereka yang langsung mengerjakan tugas di lapangan, jadi memahami secara betul bagaimana proses kerja dan tantangan sehari-hari.
6.	Masyarakat (Ketua RW)	Dipilih karena mewakili suara warga di wilayah yang terdampak langsung oleh masalah atau pembangunan drainase. Ketua RW juga sering menjadi penghubung antara warga dan dinas, sehingga tahu persoalan di lapangan dan harapan masyarakat
7.	Masyarakat	Kelompok yang terdampak langsung dari adanya ssistem drainase yang dibangun oleh Dinas PUPR. Informan dinilai dapat memberi pernyataan mengenai mana program drainase memberikan dampak nyata, serta menilai aspek kepuasan publik.

Sumber : Diolah peneliti, 2025

1.9.4 Jenis Data

Data dalam penelitian dibagi menjadi dua jenis yaitu data kualitatif dan data kuantitatif seturut dengan dengan penjelasan dari (Sugiyono, 2022). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif terdiri dari kata-kata atau kalimat yang memiliki definisi yang jelas. Selain itu, data kualitatif

juga melibatkan dokumen, foto, serta kajian pustaka sebagai data tambahan atau data pendukung dalam proses penelitian.

1.9.5 Sumber Data

Data dalam penelitian ini data diperoleh dari dua sumber yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau informan melalui metode pengumpulan data seperti wawancara dengan beberapa informan terkait, observasi, dan pengamatan langsung terhadap objek penelitian dengan melihat kondisi dilapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh secara tidak langsung dan digunakan sebagai tambahan atau pelengkap data primer. Sumber data sekunder mencakup berbagai dokumen dan informasi lainnya, catatan, laporan, arsip, peraturan-peraturan, dan berbagai referensi literatur yang relevan. Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen pendukung yang berasal dari artikel jurnal, berita online, data dari Badan Pusat Statistik (BPS), dokumen LKjIp, dan website Dinas PUPR Kabupaten Kudus.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono, 2018) teknik pengumpulan data adalah langkah penting dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mengumpulkan dan mendapatkan data yang relevan. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari 3 macam yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut (Esterberg dalam Sugiyono, 2022) wawancara adalah suatu bentuk interaksi antara dua individu yang saling berbagi informasi dan gagasan melalui proses tanya jawab dengan maksud untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu topik tertentu. Peneliti menggunakan jenis wawancara semiterstruktur dengan pelaksanaan yang lebih terbuka daripada wawancara terstruktur. Jenis wawancara ini memiliki tujuan untuk menggali permasalahan secara lebih terbuka, dimana informan diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat serta gagasan mereka.

2. Observasi

(Nasution dalam Sugiyono, 2018) menyatakan bahwa observasi merupakan dasar dari semua ilmu pengetahuan. Observasi adalah pengamatan atau pencatatan terhadap suatu masalah yang diteliti dengan menggunakan panca indera. Menurut (Spradley dalam Sugiyono, 2018) objek yang menjadi fokus penelitian disebut situasi sosial dan terdiri dari tiga komponen yaitu tempat (*place*), pelaku (*actor*) dan aktivitas (*activities*). Adapun pada penelitian ini observasi dilakukan dengan mengamati pelaksanaan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus dalam pengelolaan drainase.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah pencatatan peristiwa yang telah terjadi atau sedang terjadi. Dokumen tersebut dapat berupa foto, gambar, tulisan. Dalam penggunaan teknik dokumentasi, peneliti dapat mencari informasi berupa data

maupun dokumen yang mempunyai keterkaitan dengan topik penelitian yang akan dilakukan.

1.9.7 Analisis Interpretasi Data

Menurut (Bogdan dalam Sugiyono, 2022) berpendapat bahwa teknik analisis data merupakan tahapan menyusun dan menginterpretasi data secara terstruktur yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga memudahkan pemahaman, dan penyampaian temuan kepada orang lain. Teknik analisis interpretasi data yang digunakan peneliti dalam menganalisis kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pengelolaan drainase adalah analisis data Model Miles dan Huberman yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah kegiatan utama pada setiap penelitian. Pada penelitian kualitatif pengumpulan data diperoleh dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi (Sugiyono, 2018). Pada tahap awal peneliti akan melakukan identifikasi secara umum terhadap situasi objek yang akan diteliti.

2. Kondensasi Data

Kondensasi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok dan mengabstraksi data yang muncul dari hasil observasi, wawancara, serta dokumen. Data yang telah dipilih kemudian akan dikaitkan dengan kerangka teoritis yang digunakan oleh peneliti. Dalam

tahap ini, peneliti akan menyusun dan memilih data yang relevan dengan gejala yang ada dalam teori analisis kinerja organisasi publik.

3. Penyajian Data

Dalam penelitian ini, data disajikan dengan pendekatan naratif dalam bentuk teks. Peneliti menggunakan berbagai metode seperti uraian singkat, bagan, serta menggambarkan hubungan antar gejala. Teknik penyajian data memudahkan peneliti untuk memahami dan menganalisa data yang diperoleh untuk nantinya diolah dengan menggunakan teori kinerja organisasi publik.

4. Penarikan kesimpulan dan *verifikasi*

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mengungkapkan temuan baru atau informasi yang belum pernah diketahui sebelumnya (Sugiyono, 2018). Kesimpulan dapat dikatakan *kredibel* apabila didukung oleh data yang akurat, valid dan konsisten. Langkah selanjutnya setelah melakukan pengumpulan dan penyajian data di lapangan adalah merespon rumusan masalah yang telah diajukan penelitian dengan menghubungkan data yang telah diperoleh. Apabila data telah dihubungkan dengan rumusan masalah dan gejala pada teori maka kesimpulan penelitian dapat dirumuskan.

Teknik interpretasi data ini harus berkaitan antara satu dengan yang lain. Teknik interpretasi data diawali dengan wawancara untuk mengumpulkan data di lapangan. Banyaknya data yang telah terkumpul memerlukan adanya reduksi data. Pengumpulan data juga diperlukan untuk menyajikan data yang kemudian akan di verifikasi dan diolah untuk ditarik menjadi sebuah kesimpulan.

1.9.8 Kualitas Data

Kualitas data dalam penelitian memiliki peran signifikansi dan dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu kualitas instrumen penelitian dan proses pengumpulan data (Sugiyono, 2018). Kualitas instrumen penelitian terkait dengan metode yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data, dan jika proses pengumpulan data dilakukan dengan benar, maka hasil data yang dihasilkan akan memiliki tingkat validitas dan keandalan yang tinggi. Sebaliknya, jika teknik pengumpulan data dilakukan dengan tidak tepat maka dapat merusak kualitas instrumen data. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas data yang diperoleh. Menurut (Sugiyono, 2018) teknik triangulasi terbagi menjadi 3 yaitu :

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah teknik untuk memastikan keabsahan data dengan membandingkan atau memverifikasi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik merupakan metode untuk menguji keakuratan data dengan memverifikasi informasi dari sumber yang sama menggunakan pendekatan atau teknik pengumpulan data yang berbeda. Contohnya, data yang diperoleh melalui wawancara divalidasi kembali melalui observasi maupun analisis dokumentasi.

3. Triangulasi Waktu

Pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan pada pagi hari pada saat narasumber berada dalam kondisi prima, cenderung menghasilkan informasi yang lebih akurat. Oleh karena itu, untuk memastikan kualitas data yang diperoleh maka diperlukan verifikasi menggunakan metode lain seperti observasi atau teknik pengumpulan data tambahan pada waktu dan situasi yang berbeda.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik. Penggunaan teknik triangulasi sumber dan teknik dipilih oleh peneliti agar data yang diperoleh dari berbagai sumber dapat dianalisis dan selanjutnya dicek kembali dengan berbagai teknik seperti observasi dan dokumentasi. Teknik ini dipilih untuk menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif.